BENTUK NEGARA PADA ZAMAN SEKARANG

Nama: Winny Jumadil Putri

Email: winnyjumadil02@gmail.com

No. BP: 2010003600142

Perguruan Tinggi: Universitas Ekasakti

A. PENDAHULUAN

Negara adalah institusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan sama yang terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri. Negara dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan anggotanya dan memperoleh hidup dan memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mengatur bagaimana anggota masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya sebagai warga Negara, Negara memberikan batasan-batasan dalam wujud aturan dan hukum. Setiap Negara di dunia memiliki bentuk Negara dan bentuk pemerintahan untuk menjalankan sistem pemerintahannya, dimana setiap Negara memiliki bentuk-bentuk tersendiri.

Bentuk Negara adalah batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai Negara. Peninjauan secara sosiologis jika Negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya, sedangkan yuridis jika Negara/ peninjauan hanya dilihat dari isinya dan strukturnya.

Teori-teori bentuk Negara yang dikembangkan para ahli dan berkembang di zaman modern bermuara pada dua paham yang mendasar. Pertama, paham yang menggabungkan bentuk Negara dengan bentuk pemerintahan. Paham ini menganggap bahwa bentuk Negara dengan bentuk pemerintahan, yang dibagi dalam tiga macam, yaitu (1) bentuk pemerintahan dimana terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif. (2) bentuk pemerintahan dimana ada pemisahan yang tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. (3) bentuk pemerintahan dimana terdapat pengaruh dan pengawasan langsung dari rakyat terhadap badan legislative. Kedua, paham yang membahas bentuk Negara atas golongan demokrasi dan diktator. Paham ini membahas bentuk Negara atas golongan demokrasi dan diktator. Paham ini juga memperjelas bahwa demokrasi dibagi dalam demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Bentuk-Bentuk Negara

Bentuk Negara adalah batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai Negara. Peninjauan secara sosiologis jika Negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya, sedangkan yuridis jika Negara/ peninjauan hanya dilihat dari isinya dan strukturnya.

2. Bentuk Negara Pada Zaman Sekarang

Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk Negara yang terpenting ialah: Negara kesatuan (unitarianisme) dan negara serikat (federasi).

1. Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, Negara kesatuan ini terbagi kedalam dua macam sistem pemerintahan yaitu: sentral dan otonomi. Negara kesatuan, apabila kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak sama dan tidak sederajat.

- a. Negara kesatuan dengan system sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Model pemerintahan orde baru ini di bawah pemerintahan presiden Soeharto adalah salah satu contoh system pemerintahan model ini.
- b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah. Contohnya: kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan diwilayah sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah

otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan Malaysia dan pemerintahan paska orde baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukkan kedalam model ini.

Adapun ciri-ciri Negara kesatuan adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang tertinggi berada ditangan pemerintah pusat
- b. Pemerintah pusat menangani seluruh kedaulatan Negara baik luar atau dalam
- c. Rakyat dapat berhubungan dengan pemerintah pusat secara langsung untuk menjalankan daerahnya
- d. Hanya terdapat satu konstitusi UUD, satu kepala daerah, satu cabinet, dewan, menteri, dan parlemen
- e. Negara memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan

2. Negara Serikat

Negara serikat atau federasi merupakan bentuk Negara gabungan yang terdiri dari beberapa Negara bagian dari sebuah Negara serikat. Pada mulanya Negara-negara bagian tersebut merupakan Negara yang merdeka,berdaulat dan berdiri sendiri. Negara tersebut dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan dengan Negara serikat, negara sendirinya Negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada Negara Serikat.

Penyerahan kekuasaan dari Negara-negara bagian kepada Negara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitative (satu demi satu) dimana hanya kekuasaan yang diberikan oleh Negara-negara bagian saja (delegated powers) yang menjadi kekuasaan Serikat. Namun pada perkembangan selanjutnya, Negara serikat mengatur hal yang bersifat strategis seperti kebijakan politik luar negeri, keamanan dan pertahanan Negara.

Adakalanya dalam pembagian kekuasaan antara pemerintahan federasi dan pemerintahan Negara-negara bagian yang disebut adalah urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah Negara-negara bagian, yang berarti bahwa bidang kegiatan federal adalah urusan-urusan kenegaraan selebihnya (residuary powers).

Disamping dua bentuk diatas, dari sisi pelaksanaan dan mekanisme pemilihannya, bentuk Negara dapat digolongkan dalam tiga kelompok yaitu:

a. Monarki

Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam prakteknya, monarki ada tiga jenis yaitu:

- 1) Monarki Absolute adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi ditangan satu orang raja dan ratu.

Termasuk dalam kategori ini adalah Negara Arab Saudi, Brunei, Swazilan, Bhutan, dan lainnya.

- 2) Monarki Konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala negaranya (Perdana Menteri) dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi Negara. Praktek monarki ini adalah yang paling banyak dipraktekan di beberapa Negara, seperti Thailand, Jepang, Inggris, Jordania dan lain-lain.
- 3) Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan yang bertanggungjawab atas kebijaksanaan pemerintahannya adalah menteri, termasuk dalam kategori ini adalah Negara Inggris, Belanda dan Malaysia.

Dengan demikian pengertian Negara yang berbentuk monarki adalah Negara dimana cara penunjukan kepala Negara berdasarkan keturunan dari raja sebelumnya.

b. Oligarki

model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang di jalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.

c. Demokrasi

Pemerintahan model demokrasi adalah pemerintahan yang bersandarkan kepada kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) yang berlangsung secara jujur, bebas dan adil.

Dalam teori ilmu Negara pengertian tentang teori bentuk Negara sejak dahulu kala dibagi menjadi 2 yaitu: *Monarchie* dan *republic*. untuk menentukan suatu Negara itu berbentuk *monarchie* atau *republic*, dalam ilmu Negara banyak macam ukuran yang dipakai antara lain: Jellinec dalam bukunya yang berjudul “*allgemene staatslehere*” memakai sebagai kriteria bagaimana caranya kehendak Negara itu dinyatakan. Jika kehendak Negara itu ditentukan oleh satu orang saja maka bentuk Negara itu *monarchie* dan jika kehendak Negara itu ditentukan oleh orang banyak yang merupakan suatu majelis, maka bentuk Negara *republic*. Pendapat Jellinec ini tidak banyak penganutnya karena banyak mengandung kelemahan.

Paham Duguit lebih lazim dipakai, yang menggunakan sebagai kriteria bagaimana caranya kepala Negara itu diangkat. Dalam bukunya yang berjudul “*Traite de Droit Constitutionnel Jilid 2*” diutarakan jika seorang kepala Negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan maka bentuk Negara nya disebut *Monarchie* dan kepala negaranya disebut Raja atau Ratu. Jika kepala Negara dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan yang

ditentukan, maka bentuk Negaranya disebut republic dan kepala negaranya seorang presiden. Dimana, republic dapat dibagi menjadi:

- 1) Republic Mutlak (absolute)
- 2) Republic Konstitusi
- 3) Republic Parlemen

Menurut ketentuan yang telah dijelaskan diatas maka Negara Indonesia mempunyai bentuk Negara sebagai republik. Hal ini didasarkan atas pemilihan presiden, bahkan bukan hanya oleh majelis melainkan langsung dipilih oleh rakyat. Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan, yang berbentuk Republik

C. PENUTUP

Bentuk Negara pada Zaman sekarang adalah sebagai berikut:

1. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, Negara kesatuan ini terbagi kedalam dua macam sistem pemerintahan yaitu: sentral dan otonomi. Negara kesatuan, apabila kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah tidak sama dan tidak sederajat. Dimana, Negara kesatuan dibagi menjadi:

- a. Negara kesatuan dengan system sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat.
 - b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah.
2. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk Negara gabungan yang terdiri dari beberapa Negara bagian dari sebuah Negara serikat. Pada mulanya Negara-negara bagian tersebut merupakan Negara yang merdeka, berdaulat dan berdiri sendiri. Negara tersebut berdiri sendiri.
 3. Disamping dua bentuk diatas, dari sisi pelaksanaan dan mekanisme pemilihannya, bentuk Negara dapat digolongkan dalam tiga kelompok yaitu:
 - a. Monarki

Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam prakteknya, monarki ada tiga jenis yaitu:

- 1) Monarki Absolute adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi ditangan satu orang raja dan ratu. Termasuk dalam kategori ini adalah Negara Arab Saudi, Brunei, Swazilan, Bhutan, dan lainnya.
- 2) Monarki Konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala negaranya (Perdana Mentri) dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi Negara. Praktek monarki ini adalah yang paling banyak

dipraktekan di beberapa Negara, seperti Thailand, Jepang, Inggris, Jordania dan lain-lain.

- 3) Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan yang bertanggungjawab atas kebijaksanaan pemerintahannya adalah menteri, termasuk dalam kategori ini adalah Negara Inggris, Belanda dan Malaysia.

b. Oligarki

model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang di jalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.

c. Demokrasi

Pemerintahan model demokrasi adalah pemerintahan yang bersandarkan kepada kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) yang berlangsung secara jujur, bebas dan adil

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47, Nomor 1, 2018
- Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Laurensius Arliman S, *Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia*, *Jurnal Selat*, Volume 4, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman*, *Justicia Islamica*, Volume 13, Nomor 2, 2016
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang*, *Veritas et Justitia*, Volume 2, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Lex Jurnalica*, Volume 13, Nomor 3, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxialiary Bodies Dalam Penegakan Ham Perempuan Indonesia*, *Justicia Islamica*, Volume 14, Nomor 2, 201
- Laurensius Arliman S, *Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict*, The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference (Usicon), Volume 1, 2017.

Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.

Laurensius Arliman S, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*, Jurnal Respublica Volume 17, Nomor 2, 2018

Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial*, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitranti, Ade Sakurawati, Yasri, *Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020

- Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Laurensius Arliman S, *Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v6i2.151>.
- Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.
- Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, *Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak*, Volume 17, No Nomor, 2020.
- Larensius Arliman S, *Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika*, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).3779).
- Laurensius Arliman S, *Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, *Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia*, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.

Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, *Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.